

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu' alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat karunia dan ridlanya penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 merupakan rencana pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Banten pada bidang perpustakaan dan kearsipan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yang penyusunannya berpedoman kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017 - 2022 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten..

Akhirnya, kami berharap agar rencana program dan kegiatan yang ada dalam Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2018 dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk melaksanakan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Banten.

Wassalamu' Alaikum Wr.Wb

Serang, 2017

KEPALA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BANTEN

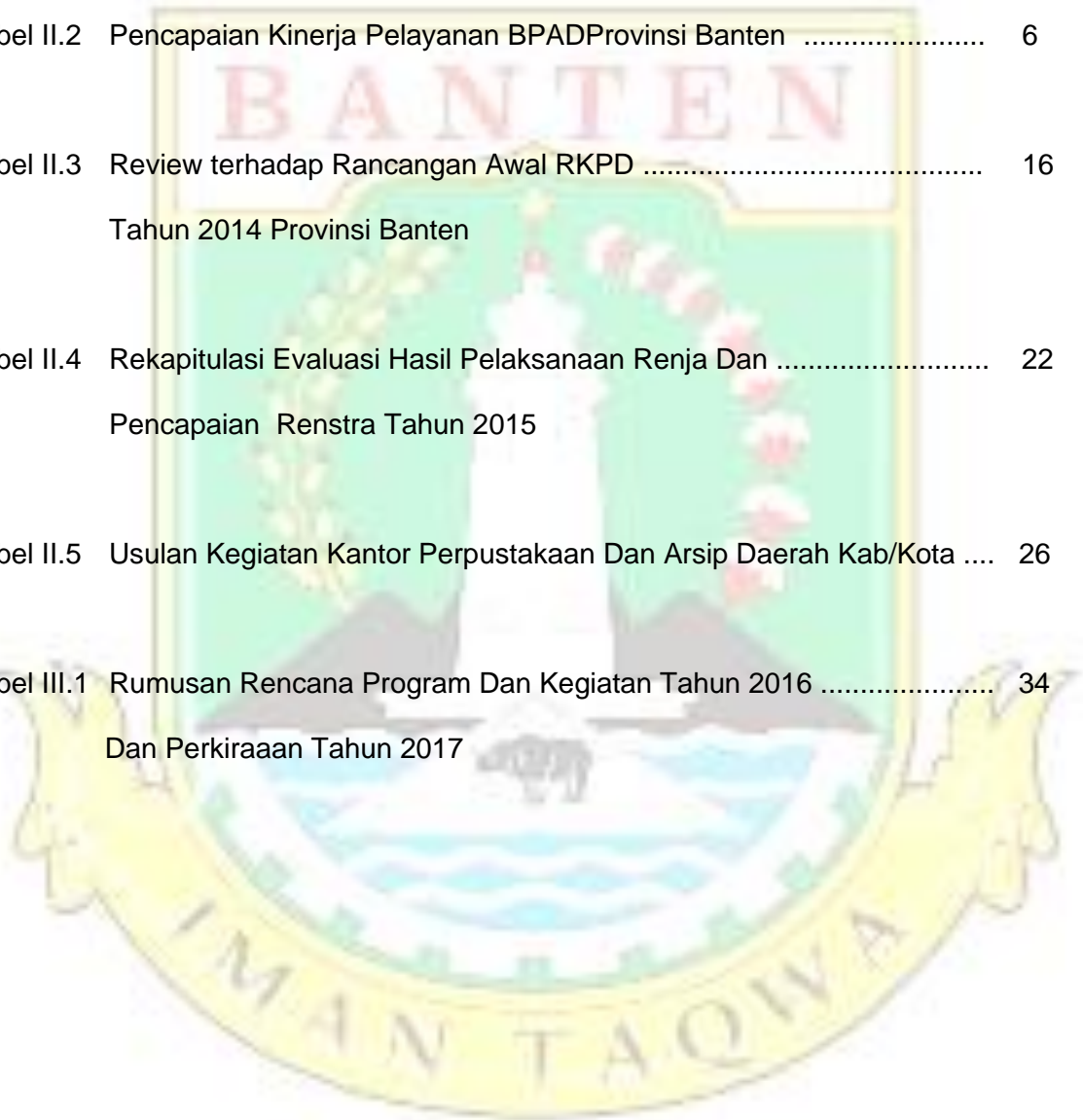
DR. H. AJAK MOESLIM, M.Pd
NIP. 19600610 198610 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	1
1.3.	Maksud dan Tujuan	2
1.4.	Sistematika Penulisan	3
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPAD	
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra.....	5
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan	5
2.3	Isu-isu Penting Pelaksanaan Tugas BPAD	8
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5	Penelahan Usulan Program Dan Kegiatan	24
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2	Tujuan dan Sasran Renja	29
3.3	Program dan Kegiatan	32
BAB IV	PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPADProvinsi Banten	6
Tabel II.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	16
	Tahun 2014 Provinsi Banten	
Tabel II.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan	22
	Pencapaian Renstra Tahun 2015	
Tabel II.5	Usulan Kegiatan Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kab/Kota	26
Tabel III.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2016	34
	Dan Perkiraan Tahun 2017	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan Perundangan beserta penjabarannya, merupakan titik tolak pelaksanaan perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi dan sinergis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Salah satu implementasi adalah kewajiban bagi setiap satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja (RENJA) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, untuk jangka pendek (tahunan) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun ke depan (2018) berisi rencana program dan kegiatan pembangunan perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Banten.

Dengan demikian, Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2018 diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2018 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan tentang Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030;
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Banten 2017-2022;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2018 adalah untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perpustakaan dan kearsipan tahun 2018 sesuai tugas dan fungsinya.

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 yang sesuai/sejalan dengan target-target pembangunan RPJMD Provinsi Banten tahun 2017 – 2022 yang telah dituangkan dalam Renstra DPK Provinsi Banten dengan diselaraskan dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah Provinsi Banten Tahun 2018, dimana telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten ;
- Tersusunnya pedoman untuk pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPK TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja, capaian Renstra DPK Provinsi Banten tahun 2012-2017, analisi kinerja pelayanan, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan dan Riview terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2018.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi tentang telahan terhadap kebijakan nasional dalam bidang perpustakaan dan kearsipan, perumusan tujuan dan sasaran Renja serta rencana program, kegiatan, indikator, target kinerja serta pagu anggaran indikatif.

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait tugas pokok dan fungsi DPK Provinsi Banten.

- Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPK Provinsi Banten
- Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan uraian mengenai :

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan .
- Kaidah pelaksanaan.
- Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2012-2017

Dengan masa berakhirnya RENSTRA DPK tahun 2012 – 2017 pada tahun 2017 ini merupakan menjadi tahun transisi penyusunan RENSTRA baru tahun 2017 – 2022.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten dan capaian Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten selengkapnya dapat dilihat pada table II-1, berdasarkan hasil evaluasi tersebut ada beberapa implikasi yang ditimbulkan, antara lain :

- Program Renstra yang capaiannya sampai tahun 2017 sudah 100% tidak berarti bahwa pelaksanaan program dan kegiatannya dihentikan, akan tetapi akan terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, dengan memperhatikan RENSTRA terbaru DPK tahun 2017-2022 sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.
- Menginjak masa berakhirnya RENSTRA DPK pada tahun 2017 maka untuk Program Renstra yang capaiannya belum 100% akan menjadi bahan evaluasi untuk dapat disesuaikan pada rencana program dan kegiatan pada RPJMD, RKPD dan RENSTRA DPK Provinsi Banten yang terbaru tahun 2017-2022.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis DPK Provinsi Banten Tahun 2012-2017, diketahui bahwa beberapa indikator dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan dan sebagian lagi ada indikator yang belum sesuai dengan target. Penilaian capaian target tersebut juga dilakukan terhadap beberapa indikator yang belum masuk dalam Renstra, akan tetapi tetap diberikan penilaian karena dianggap merupakan indikator keberhasilan DPK Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Secara lebih jelas indikator-indikator dimaksud dan realisasinya dapat dilihat Tabel II-1.

Tabel II.1

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Provinsi Banten dari Tahun 2012 - 2017**

No.	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra DPK					Realiai Capaian				
				Tahun 2013 (Thn n-1)	Tahun 2014 (thn n-2)	Tahun 2015 (thn n-3)	Tahun 2016 (thn n-4)	Tahun 2017 (thn n-5)	Tahun 2013 (Thn n-1)	Tahun 2014 (n-2)	Tahun 2015 (n-3)	Tahun 2016 (n-4)	Tahun 2017 (n-5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Standar Operasional Prosedur (SOP) pada DPK yang berkaitan langsung dengan Pelayanan Publik			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
2	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
3	Data Base Pembangunan DPK			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
4	Sarana, Prasarana, barang dan jasa kantor			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
5	SDM DPK yang mengikuti Diklat Struktural dan Teknis Fungsional			5 Orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 Orang	5 orang	5 orang	5 Orang	5 Orang
6	Gedung Depo Arsip dan Perangkat Pendukung			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
7	Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan MPUK			240 org/hari	280 org/hari	320 org/hari	360 org/hari	500 org/hari	240 org/hari	280 org/hari	320 org/hari	360 Orang/Hari	500 Orang/Hari
8	Jumlah Anggota Perpustakaan			29,250	36.563	45.704	57.130	71.413	29,250	36.563	30.704	57.130	71.413
9	Jumlah Kunjungan ke layanan Telematika dan Informatika			60 org/hari	70 org/hari	80 org/hari	90 org/hari	125 org/hari	60 org/hari	70 org/hari	80 org/hari	230 orang/hari	467 orang/hari
10	Regulasi Pengelolaan Perpustakaan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
11	Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar			9 Unit	18 Unit	26 Unit	34 Unit	42 Unit	9 Unit	18 Unit	26 Unit	30 Unit	30 Unit
12.	Jumlah Pustakawan DPK			3 Orang	3 Orang	3 Orang	4 Orang	5 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang
13	Kualitas dan Jumlah Koleksi Bahan Pustaka			30.000	35,000	40,000	45,000	50,000	30.000	35,000	40,000	49.000	50.283
14	Pengelolaan Arsip											38 SKPD	40 SKPD

No.	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra DPK					Realiai Capaian				
				Tahun 2013 (Thn n-1)	Tahun 2014 (thn n-2)	Tahun 2015 (thn n-3)	Tahun 2016 (thn n-4)	Tahun 2017 (thn n-5)	Tahun 2013 (Thn n-1)	Tahun 2014 (n-2)	Tahun 2015 (n-3)	Tahun 2016 (n-4)	Tahun 2017 (n-5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	SKPD yang sesuai ketentuan/standard an terkoneksi dengan JIKP			22 SKPD	27 SKPD	32 SKPD	38 SKPD	43 SKPD	22 SKPD	27 SKPD	32 SKPD		
15	Jumlah Dokumen /Arsip Statis dan Dinamis yang terpelihara dengan baik			22 SKPD	27 SKPD	32 SKPD	38 SKPD	43 SKPD	22 SKPD	27 SKPD	32 SKPD	38 SKPD	40 SKPD
16	Jumlah Arsiparis			2 Orang	2 Orang	3 Orang	3 Orang	5 Orang	2 Orang	2 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang
17	Regulasi Pengelolaan Arsip Pemerintah Provinsi Banten			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu unsur utama dalam mendukung pelaksanaan tugas, bahkan menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. Sarana dan Prasarana utama yang dimiliki DPK Provinsi Banten dalam rangka melaksanakan urusan perustakaan dan kearsipan dirasakan tahun tiap tahun mengalami peningkatan. Kondisi eksisting DPK Provinsi Banten pada tahun 2018 sekarang sudah mulai mengalami perubahan, dimana gedung perpustakaan dan kearsipan yang awalnya menjadi satu sudah mulai berpisah dengan gedung arsip yang baru sehingga tupoksi pekerjaan dalam layanan perpustakaan dengan pengelolaan dan pelayanan depo arsip bisa lebih ditingkatkan.

Berdasarkan Kondisi eksisting tersebut maka dibutuhkan optimalisasi sarana/peralatan penunjangnya yang meliputi ruang pemilahan, ruang layanan, ruang konservasi, ruang pameran, ruang studio yang berdampak pada optimalnya pengelolaan arsip yang dilaksanakan oleh DPK Provinsi Banten. Selain hal tersebut masih terdapatnya penyelenggaraan kearsipan secara elektronik juga belum optimal dikarena masih kurangnya sarana dan

prasarana serta terbatasnya sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas

Salah satu unsur pendukung layanan perpustakaan adalah mobil unit perpustakaan keliling (MUPK) yang saat ini dimiliki DPK Provinsi Banten sebanyak 5 unit. Dari jumlah tersebut, dua unit diantaranya dalam kondisi kurang baik karena tua (Tahun 2003, 2004), sementara tiga unit lagi masih dalam kondisi yang baik. Jika dibandingkan dengan besarnya permintaan masyarakat untuk dilayani MUPK, maka jumlah tersebut masih dirasa kurang dalam melayani permintaan layanan MUPK karena keterbatasannya sarana dan prasarana MUPK, atau karena kondisi fisik MUPK yang tidak memungkinkan (rusak).

Prasaran penunjang lainnya yang dirasakan masih perlu ditingkatkan adalah jumlah perabot seperti meja baca, kursi baca, rak buku, lemari dll, sarana audio visual dan perangkat pendukung layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Layanan berbasis teknologi TIK sampai saat ini sudah mengalami peningkatan dengan tersedianya sampai tahun 2018 sudah terdapat 2 armada mobil pintar sehingga diharapkan mampu memberikan layanan sebagaimana diharapkan.

Tahun 2018 DPK Provinsi Banten sudah dapat menyiapkan perangkat lunak (software) dan perangkat jaringan dan perangkat keras (PC). Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan berbasis TIK masih dibutuhkan penambahan perangkat keras dan peningkatan kerjasama atau konektivitas jaringan dengan perpustakaan kabupaten/kota, perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi di seluruh Indonesia. Demikian juga dengan pengembangan bahan sistem informasi kearsipan pemerintah (SIKP) masih diperlukan penambahan dan pengembangan sistem dan perangkat pendukung pengelolaan arsip daerah.

B. Minat Baca dan Kearsipan

1. Minat Baca

Berdasarkan tanggapan dari Kepala Perpustakaan Nasional, membantah yang menyebutkan pandangan budaya baca di Indonesia rendah sebagaimana hasil penelitian yang menyatakan nomor dua terendah dari 61 negara di dunia. "Sebenarnya bukan minat baca yang

rendah, tapi buku yang mau dibaca amat kurang,". Selain hal tersebut terdapatnya kesenjangan distribusi buku antar wilayah sehingga masyarakat yang jauh dari pusat kota sulit mengakses buku. Sebanyak 74 persen perpustakaan yang ada saat ini masih berada di Pulau Jawa, sementara yang di luar Jawa masih sedikit.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyatakan bahwa Perpustakaan berfungsi sebagai wahan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten berkewajiban antara lain menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah dan menggalakan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan.

Setelah pemberlakuan UU 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, membawa konsekwensi bagi daerah yaitu antara lain harus segera menindaklanjuti dengan penyusunan perangkat regulasi tentang perpustakaan di daerah serta melaksanakan amanat yang terkandung didalamnya.

Berdasarkan data yang ada jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Provinsi Banten Tahun 2017 (sampai dengan bulan desember 2017) adalah 361 orang/hari dan jumlah anggota sebanyak 44.394 orang. Kunjungan masyarakat ke perpustakaan sudah mulai peningkatan walaupun belum signifikan yang disebabkan masih belum optimalnya upaya mempromosikan perpustakaan yang dilaksanakan selama ini sehingga keberadaannya masih belum dikenal sampai ke plosok –plosok daerah dan Penyebab faktor lainnya adalah masih kurangnya jumlah dan variasi/jenis koleksi bahan pustaka, pelayanan ke pemustaka yang belum profesional sehingga perlu diadakan sistem pelatihan,serta masih kurang bervariasinya event-event kegiatan yang menarik peminat untuk mendatangkan banyak masyarakat ke perpustakaan.

Minat baca anak-anak Indonesia, masih sangat rendah. Data dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization

(UNESCO) menunjukkan, persentase minat baca anak Indonesia hanya 0,01 persen. Artinya, dari 10.000 anak bangsa, hanya 1 orang yang senang membaca. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masih rendahnya minat dan budaya masyarakat secara umum adalah sebagai berikut:

- a. karena sistem pembelajaran yang belum memuat "keharusan" membaca buku;
- b. karena makin banyaknya jenis hiburan, tayangan TV, tempat rekreasi, bahkan permainan anak yang makin "menyingkirkan" waktu anak untuk membaca;
- c. karena budaya baca memang sulit dikembangkan sebagai perilaku anak-anak;
- d. Akses Informasi dari dan ke Perpustakaan (sumber-sumber bacaan) terbatas
- e. Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif masih dibawah standar
- f. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang kurang menguntungkan sehingga mempengaruhi daya beli terhadap bahan bacaan
- g. Layanan perpustakaan kepada masyarakat belum merata
- h. Apresiasi dan respon masyarakat terhadap perpustakaan yang masih rendah.

Pembinaan dan pengembangan minat dan budaya baca masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat. Pemerintah dapat berperan sebagai penggerak utama, yaitu sebagai pemberi motivasi bimbingan teknis, serta pembina. Pembudayaan kegemaran membaca dapat dilaksanakan melalui 5 jalur. Yaitu :

- a. Rumah tangga/Keluarga
- b. Masyarakat dan lingkungan luar sekolah
- c. Pendidikan
- d. Instansional/Perkantoran
- e. Fungsional/Perpustakaan.

2. Kearsipan

Arsip identik dengan catatan (*record*) tentang perjalanan organisasi atau negara. Seluruh catatan yang ditimbulkan dari perjalanan organisasi atau negara yang setiap kegiatannya menyentuh hajat hidup orang banyak tentu tidak boleh hilang atau terbengkalai. Arsip juga merupakan upaya menyelamatkan dokumen negara agar seluruh catatan pergerakan organisasi atau negara menjadi teratur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seringkali kearsipan masih dianggap hanya persoalan sejarah atau memori saja, dan belum dijadikan sebagai persoalan penting bangsa, yang dapat mempengaruhi baik buruknya perjalanan satu organisasi atau negara. Pengelolaan arsip yang baik dan benar dapat berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Selain sebagai memori kolektif mengenai perjalanan bangsa, arsip juga dapat berperan dalam pengembangan kebudayaan nasional dan daerah.

Untuk tingkat Nasional sudah tersusun peraturan atau regulasi yang mengatur masalah kearsipan, yaitu:

- a. Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan
- b. Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang kearsipan
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis
- d. Peraturan Kepala Arsip Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan akses Arsip dinamis.
- e. Peraturan Kepala Arsip Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2001 tentang tata cara pembuatan daftar, Pemberkasan dan Pelaporan, serta Penyerahan Arsip Terjaga.
- f. Peraturan Kepala Arsip Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang tata cara penyediaan arsip dinamis sebagai informasi publik
- g. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2011 tentang pedoman akses dan Layanan Arsip Statis.

Sejak terbentuknya kantor KPDE dan Arsip Daerah Provinsi Banten tahun 2002 sebagai cikal bakal sekaligus wujud konkrit perhatian Pemerintah Provinsi Banten terhadap pengelolaan arsip, pembangunan bidang kearsipan lebih dititik beratkan pada penguatan kelembagaan melalui penyusunan seperangkat regulasi atau kebijakan kearsipan.

Peraturan atau regulasi pengelolaan kearsipan untuk tingkat Provinsi Banten yang juga sudah disusun yaitu:

- a. Peraturan Daerah provinsi Banten Nomor 47 tahun 2002 tentang penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan pemerintah Provinsi Banten
- b. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten.
- c. Keputusan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2008 tentang uraian tugas dan tata kerja BPAD Provinsi Banten.
- d. Keputusan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2003 tentang tata kearsipan Pemerintah Provinsi Banten.
- e. Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2005 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- f. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2005 tentang jadwal Retensi Arsip keuangan Pemerintah Provinsi Banten.
- g. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2006 tentang Retensi Arsip Fasilitatif Pemerintah Provinsi Banten.
- h. Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan Pokok Kearsipan membawa beberapa Konsekwensi bagi daerah, antara lain daerah harus segera menyesuaikan perangkat regulasi kearsipan daerah dengan Undang-undang yang baru tersebut. dengan demikian perangkat regulasi kearsipan Pemerintah Provinsi Banten yang sudah ada saat ini harus

segera diriview dan dikaji kesesuaian atau keselarasannya dengan perangkat regulasi kearsipan ditingkat nasional.

C. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten didukung aparatur yang terbagi menurut bidang dan sekretariat. Pada tahun 2017 jumlah pegawai yang berada di lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten adalah sebanyak 122 orang.

Tabel II.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan 2017

No	Pendidikan	PNS (orang)	CPNS (orang)	TKK/TKS (orang)	Jumlah Pegawai (orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6(3+4+5)	(7)
1.	S3	1	-	-	1	1,4%
2.	S2	13	-	-	13	18,1%
3.	S1	30	-	17	47	41,7%
4.	D3	8	-	-	8	11,1%
5.	SMA	20	-	33	53	27,8%
Jumlah		72	0	50	122	100,0%

Tabel II.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	Esselon II	1
2.	Esselon III	4
3.	Esselon IV	11
Jumlah		16

Tabel II.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	Pustakawan	9
2.	Arsiparis	5
3	Fungsional Umum/Pelaksana	42
Jumlah		56

Tabel II.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	Laki-Laki	79
2.	Perempuan	43

Sejalan dengan semangat untuk lebih mendayagunakan perpustakaan dan meningkatnya kesadaran/pemahaman akan pentingnya kearsipan, maka perlu diupayakan dengan semaksimal mungkin percepatan untuk mengakat/mewujudkan tenaga/pejabat fungsional dan tenaga teknis pendukung sesuai kebutuhan organisasi, baik melalui rekrutmen maupun melalui pendidikan dan pelatihan pegawai yang ada.

D. Sinergitas Pembangunan

Indikator pengelolaan pemerintah yang maju adalah adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel disertai dengan perbaikan hubungan antar seluruh lembaga, dan adanya perubahan pola pikir atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Mandiri mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dinyatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak bergantung pada bantuan atau subsidi pemerintah pusat.

Berdaya saing mengandung arti bahwa daerah berkemampuan mengelola, mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta mengeliminir berbagai hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dari daerah lainnya.

Sejahtera diukur melalui Indek Pembangunan Manusia melalui tiga indikator utama yaitu pendidikan, kesehatan dan kondisi daya beli masyarakat.

Akhlakul karimah menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang menerapkan nilai-nilai agama, yakni nilai-nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan keberadaan manusia beserta alam seisinya.

Melalui penjabaran visi tersebut perlu dinyatakan dengan tegas bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Banten menopang

keseluruhan visi pemerintahan dan mengimplentasikan visi menjadi misi dan tujuan yang dapat tercapai.

Perpustakaan dan kearsipan memiliki kemiripan dalam pengurusan kegiatan dan layanan informasi, hal ini dapat ditelusur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Secara detail masing-masing pekerjaan itu tidak sama pengaturannya. Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam tugas dan fungsi pelayanan DPK terdapat beberapa aspek telaah. **Tabel. II.6**

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum maksimalnya pelayanan perpustakaan dan kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana baik jumlah maupun kualitasnya belum lengkap 2. Sumber daya manusia Perpustakaan dan Kearsipan yang baik dari kualifikasi dan kompetensi masih kurang 3. Implementasi regulasi perpustakaan dan kearsipan belum maksimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana dan prasarana belum memenuhi kebutuhan 2. Terdapat SDM yang belum memenuhi kualifikasi tenaga perpustakaan dan kearsipan 3. Belum terpahaman regulasi perpustakaan dan kearsipan dalam pelaksanaan kegiatan
2	Pemanfaatan TIK di Perpustakaan dan Kearsipan belum maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi yang mendukung kebutuhan perpustakaan dan kearsipan yang berbasis TIK 2. Belum tersedianya SOP yang memanfaatkan TIK dalam aktifitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Otomasi perpustakaan dan kearsipan belum optimal dimanfaatkan 2. Pelayanan perpustakaan dan kearsipan belum mengacu pada SOP yang berbasis TIK 3. Layanan media

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>Kerja</p> <p>3. Pengelolaan kegiatan perpustakaan dan kearsipan dari bentuk manual ke otomasi belum optimal</p> <p>4. Belum terintegrasinya koneksi SIKD-JIKD semua dinas</p>	<p>elektronik perpustakaan dan kearsipan belum optimal dimanfaatkan</p> <p>4. koneksi SIKD-JIKD semua dinas belum terintegrasi</p>
3			
	Belum Maksimal Pembinaan Kelembagaan Perpustakaan dan Kearsipan	Pembinaan Kelembagaan Perpustakaan dan Kearsipan belum seluruhnya sesuai standar	Standar Perpustakaan dan kearsipan belum dipahami secara merata
4			
	Jumlah Koleksi bahan perpustakaan dan kearsipan masih terbatas	<p>1. Koleksi bahan perpustakaan masih terbatas</p> <p>2. Belum optimal kegiatan pemeliharaan arsip statis yang berkesinambungan</p> <p>3. Arsip konvensional belum seluruhnya di alih media</p> <p>4. Data dan informasi pembangunan daerah masih sangat terbatas</p> <p>5. Khasanah arsip statis masih sangat terbatas</p>	Pengelolaan sistem kearsipan belum optimal dilaksanakan melalui kegiatan akuisisi dan pemeliharaan
5			
	Indeks minat baca masih sangat rendah dan kesadaran arsip masih rendah	<p>1. Jumlah pengunjung masih minim</p> <p>2. Budaya membaca masih rendah</p> <p>3. Penataan arsip belum optimal</p>	<p>1. Budaya baca yang rendah</p> <p>2. Kualitas pelayanan dan kearsipan belum optimal</p> <p>3. Kerjasama perpustakaan dan kearsipan belum optimal</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
6	Perpustakaan dan kearsipan belum dikembagkan sebagai pusat wisata edukasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diorama, teater, kafe buku masih terbatas 2. Sarana prasarana untuk wahana edukasi anak masih sedikit 3. Sarana dan prasarana arsip belum tersedia 	Perpustakaan dan kearsipan belum menjadi tujuan atau destinasi wisata edukasi

Kajian Urusan Perpustakaan

1. Membiasakan dan membudayakan kegemaran dan budaya membaca masyarakat di daerah Banten belum terlaksana dengan optimal, terindikasi dengan pemustaka yang memanfaatkan sarana perpustakaan untuk proses pendidikan, penelitian, penelusuran informasi, rekreasi belum memenuhi harapan.
2. Pengembangan berbagai jenis perpustakaan yakni perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi yang tersebar di wilayah provinsi Banten masih rendah, terindikasi dengan keberadaan perpustakaan yang sesuai standar masih belum sesuai dan memberi dampak pada mobilitas pemustaka untuk mengunjungi dan menerima layanan tidak optimal.
3. Perpustakaan adalah pustakawan, ditemukan keterbatasan kuantitas dan kualitas tenaga fungsional pustakawan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan perpustakaan sehingga berdampak rendahnya pemenuhan kebutuhan pemustaka.

Kajian Urusan Kearsipan

1. Pemahaman dan kesadaran aparaturnya pemerintah terhadap pentingnya kearsipan masih ditemukan rendah, ditambah dengan keterbatasan kuantitas kualitas tenaga fungsional kearsipan maupun tenaga pengelola kearsipan.

2. Mewujudkan Provinsi Banten tertib arsip dengan di dukung oleh khasanah arsip yang lengkap serta pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam bidang arsip belum dilaksanakan dengan maksimal.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan untuk membandingkan dengan analisis terhadap kebutuhan akan program, kegiatan dan anggaran yang diperlukan.

Pelaksanaan review terhadap rancangan awal RKPD ditemukan beberapa hal, yaitu:

- ❖ Dalam rancangan awal RKPD belum mengakomodasi pagu anggaran yang sesuai dengan kebutuhan prioritas indikatif baik berdasarkan program, kegiatan maupun OPD
- ❖ Dalam rancangan awal RKPD juga belum ada rencana kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

Dalam rancangan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2018 sudah menuangkan rencana program yang mengacu kepada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dan RENSTRA Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2017-2022, dan hasil analisis kebutuhan lebih jelas dapat pada Tabel II-3.

Tabel II. 7

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten

NO. KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLAK UKUR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU RENJA FINAL TAHUN 2018
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	100%	13.745.000.000
5	2				BELANJA LANGSUNG			17.388.270.000

NO. KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLAK UKUR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU RENJA FINAL TAHUN 2018
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
						Pemerintahan Umum, Otonomi dan Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
1	2	1	7	01		Program Tata Kelola Pemerintahan			9.410.618.000
1	2	1	7	01	001	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		100%	100.000.000
							1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	2 Dokumen	33.440.000
							2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2 Kegiatan	33.380.000
							3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	2 Dokumen	33.180.000
1	2	1	7	01	002	Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		100%	272.500.000
							1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	3 Dokumen	32.400.000
							2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9 Dokumen	232.300.000
							3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	5 Dokumen	7.800.000
1	2	1	7	01	003	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur			2.630.000.000

NO. KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLAK UKUR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU RENJA FINAL TAHUN 2018
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
							1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	9 Kegiatan	2.630.000.000
1	2	1	7	01	004	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		100%	930.600.000
							1 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor	12 bulan	180.500.000
							2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 bulan	323.300.000
							3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK	12 bulan	426.800.000
1	2	1	7	01	005	Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		100%	3.878.400.000
							1 Operasional kantor Tidak tetap	12 bulan	82.100.000
							2 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)	12 bulan	219.400.000
							3 Penyediaan Barang Habis Pakai	12 bulan	382.680.000
							4 Penyediaan Bahan Cetak	12 bulan	168.550.000
							5 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 bulan	1.021.000.000
							6 Penyediaan Promosi dan Publikasi	12 bulan	46.200.000
							7 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 bulan	1.671.600.000

NO. KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLAK UKUR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU RENJA FINAL TAHUN 2018
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
							8 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo	12 bulan	62.950.000
							9 Penyediaan BBM	12 bulan	223.920.000
1	2	1	7	01	006	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur		100%	124.000.000
							1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	1 Kegiatan	8.700.000
							2 Peningkatan Kompetensi Aparatur	3 Kegiatan	115.300.000
1	2	1	7	01	007	Kegiatan Rapat Koordinasi ke Dalam dan Keluar Daerah		100%	1.250.118.000
							1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	495.860.000
							2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	754.258.000
1	2	1	7	01	008	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan Dan Pelayanan Perpustakaan			50.000.000
							Pengelolaan Kearsipan Dinamis	12 Bulan	50.000.000
1	2	1	7	01	009	Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral			175.000.000
							1 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah	1 Paket data profil	95.660.000
							2 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah	1 Paket Visualisasi	40.390.000

NO. KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLAK UKUR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU RENJA FINAL TAHUN 2018
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
						3 pengelolaan PPID	1 kegiatan	4.950.000
						4 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	4 nilai IKM	34.000.000
					PERPUSTAKAAN			
1	2	1	7	15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			3.234.000.000
1	2	1	7	15	004	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat		1.544.000.000
						1 Peningkatan Pembudayaan Kegemaran Membaca	1360 orang	1.544.000.000
1	2	1	7	15	005	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan		1.440.000.000
						1 Standarisasi Perpustakaan	2 kegiatan	355.034.000
						2 Pengembangan Perpustakaan	2 kegiatan	1.084.966.000
1	2	1	7	15	006	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan		250.000.000
						1 Presentase OPD yang Menyelenggarakan Kearsipan Sesuai Ketentuan Kearsipan	80%	79.843.000

NO. KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLAK UKUR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU RENJA FINAL TAHUN 2018
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
							2 Standarisasi Kearsipan	20 dokumen	104.145.000
							3 Jumlah Arsiparis Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	5 orang%	66.012.000
1	2	1	7	16		Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan			2.667.852.000
1	2	1	7	16	001	Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan			737.452.000
							1 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	2 Kegiatan	250.189.000
							2 Kerjasama Perpustakaan	36 komunitas / lembaga	180.141.000
							3 Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan	150.000 orang	307.122.000
1	2	1	7	16	003	Kegiatan Pengelolaan Bahan Deposit dan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan			1.430.000.000
							1 Peningkatan Koleksi E-Book	1 paket	196.200.000
							2 Peningkatan Koleksi Perpustakaan	6000 eks	1.207.285.000

NO. KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLAK UKUR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU RENJA FINAL TAHUN 2018
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
							3 Penelusuran karya cetak karya rekam dan Penyusunan Literatur Sekunder	50 eks	26.515.000
1	2	1	7	16	002	Kegiatan Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika			500.400.000
							1 Otomasi Perpustakaan	2 Paket, 1 kali FGD	262.595.000
							2 Layanan media elektronik perpustakaan	12 bulan, 1 kali lomba	237.805.000
						KEARSIPAN			
1	2	1	8	15		Program Pengelolaan sistem kearsipan			2.075.800.000
1	2	1	8	15	001	Kegiatan Penelusuran, Akuisisi dan Pemeliharaan Arsip Statis			1.175.000.000
							1 Digitalisasi Arsip Statis Banten	100 Box	210.195.000

NO. KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLAK UKUR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU RENJA FINAL TAHUN 2018
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
							2 Preservasi Arsip	2 Kali Fumigasi dan Perawatan	138.253.000
							3 Akuisisi Arsip Statis Banten	3.400 box	826.552.000
1	2	1	8	15	002	Kegiatan Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Arsip			300.800.000
							1 Pemanfaatan Arsip	1 dokumen	98.460.000
							2 Pelayanan Kearsipan	13.000 orang	202.340.000
1	2	1	8	15	003	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis			600.000.000
							1 Penataan Arsip Di Record Center OPD	10 OPD	212.458.000
							2 Penataan Arsip Elektronik/Media Baru OPD	10 OPD	182.098.000
							3 Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah	10 OPD	205.444.000

NO. KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLAK UKUR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU RENJA FINAL TAHUN 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG				31.133.270.000

Tabel II – 8

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dengan Pencapaian Renstra Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n-0)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2016			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017 n-3)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2016 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)	Tingkat Realisasi Tahun 2016 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2017 n-3)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1	20	Urusan Pemerintahan Umum, Otonomi dan administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian Persandian								
1	20	9	Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	• Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	10% (0,1)
				• Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan pengendalian dan evaluasi laporan keuangan	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	10 % (0,1)
1	20	9	1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	10% (0,1)
1	20	9	2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	10% (0,1)
1	20	10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan kapasitas Aparatur	• Rasio Penyediaan Barang dan Jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumahtanggaan	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	10% (0,1)
				• Rasio Pembangunan, pengadaan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	10% (0,1)
				• Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan tata usaha	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	10% (0,1)

					kerumahtanggaan									
1	20	10	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Penyediaan Sarana, Prasarana, Barang dan Jasa Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	10% (0,1)	
1	20	10	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	10% (0,1)	
1	20	10	3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Penyediaan Barang dan Jasa Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	10% (0,1)	
1	20	10	4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	SDM BPAD yang mengikuti Diklat Struktural dan Teknis Fungsional	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	5 Orang	10% (0,1)	
1	23			Urusan Statistik										
1	23	1		Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	1 Paket	1 Psket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	10% (0,1)	
1	23	1	1	Kegiatan Penyediaan data Pembangunan Daerah		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20% (0,2)	
1	24	1		Urusan Kearsipan										
1	24	1		Program Pembinaan Kearsipan Daerah	Pengelolaan Arsip SKPD yang sesuai ketentuan/Standar dan terkoneksi dengan JIKP	41 SKPD	17 SKPD	27 SKPD	27 SKPD	100%	32 SKPD	32 SKPD	78% (0,78)	
1	24	1	1	Penataan dan Pengembangan kearsipan Daerah Provinsi Banten	Jumlah Dokumen /Arsip statis dan dinamis yang terpelihara dengan baik	41 SKPD	17 SKPD	27 SKPD	27 SKPD	100%	32 SKPD	32 SKPD	78% (0,78)	
1	24	1	2	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kearsipan Daerah Provinsi Banten (SIKP)	Pengelolaan Arsip SKPD yang sesuai ketentuan/Standar dan terkoneksi dengan JIKP	41 SKPD	17 SKPD	27 SKPD	27 SKPD	100%	32 SKPD	32 SKPD	78% (0,78)	
1	24	1	3	Pembinaan Aparatur Pengelola Kearsipan Daerah Provinsi Banten	Jumlah Arsiparis	5 Orang	1 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	3 Orang	3 Orang	60% (0,6)	
1	24	1	4	Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah	Regulasi pengelolaan Arsip Pemprov Banten	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	10% (0,1)	
1	26			Urusan Perpustakaan										
1	26	1		Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Tingkat Kunjungan Perpustakaan per Hari % Meningkatnya kunjungan ke website	500 orang/hari 125 orang	200 orang/hari 0	280 orang/hari 70	280 orang/hari 70	100%	320 Orang/hari 80 Orang	320 orang/hari 80 orang	64% (0,64) 64% (0,64)	
1	26	1	1	Peningkatan Kualitas Layanan dan kerja sama Perpustakaan	Jumlah pengunjung Perpustakaan	500 orang/hari	200 orang/hari	280 orang/hari	280 orang/hari	100%	320 Orang/hari	320 orang/hari	64% (0,64)	
1	26	1	2	Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Jumlah anggota perpustakaan	71,413 Orang	22,203	36.563	36,563	100%	45,704	45,704	63,99% (0,63)	
1	26	1	3	Pengembangan Layanan dan Informasi Perpustakaan berbasis	Jumlah Kunjungan ke Layanan Telematika dan Informatika	125 org	0	70	70	100%	80 Org	80 Org	64% (0,64)	

				Teknologi Informasi									
1	26	2		Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan sesuai standar	42 Unit	1	18 Unit	18	100%	26 Unit	26 Unit	61,90% (0,61)
1	26	2	1	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan sesuai standar	42 Unit	1	18 Unit	18	100%	26 Unit	26 Unit	61,90% (0,61)
1	26	2	2	Kegiatan Pengelolaan bahan deposit dan otomasi Karya Cetak Rekam dan Naskah Kuno tentang Banten	Kualitas dan Jumlah koleksi Bahan Pustaka	50,000 Eksp	25,000 Eksp	35.000 Eksp	35,000 Eksp	100%	40.000 Eks	40,000 Eksp	80% (0,8)
1	26	1	3	Kegiatan penyediaan bahan pustaka perpustakaan	Kualitas dan Jumlah bahan pustaka	50,000 Eksp	25,000 Eksp	35.000 Eksp	35,000 Eksp	100%	40.000 Eks	40,000 Eksp	80% (0,8)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil Forum Perangkat Daerah 2018 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten dengan Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten/Kota, Steckholder (TBM) serta ikatan Pustakawan Indonesia Rakor Bidang Perpustakaan dan Kearsipan pada tanggal s.d Bulan 2017 di usulkan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan Menghasilkan butir – butir kesepakatan sebagai berikut:

I. Bidang Perpustakaan

- a. Program kegiatan bidang perpustakaan perlu dipertahankan dan ditingkatkan
- b. Kebutuhan Pustakawan sangat mendesak untuk dipenuhi
- c. Pendidikan dan pelatihan profesi pustakawan wajib diadakan setiap tahun
- d. Perlu pengangkatan/penetapan tenaga teknis perpustakaan yang dibiayai oleh APBD
- e. Perlu adanya kesamaan penyampaian informasi bahwa perpustakaan merupakan jantung pendidikan

II. Bidang Kearsipan

- a. Kebutuhan anggaran yang memadai bagi bidang kearsipan (diperlukan tambahan alokasi anggaran di bidang kearsipan melalui usulan bantuan keuangan secara tertulis dari Kab/Kota kepada Provinsi Banten;
- b. Kebutuhan Arsiparis sebagai jabatan fungsional sudah sangat mendesak (sangat dibutuhkan);
- c. Pendidikan dan pelatihan di Bidang Kearsipan wajib diadakan setiap tahun;
- d. Kebutuhan kegiatan stimulant bagi sosialisasi bidang kearsipan wajib diadakan dan digalakkan berjenjang bekerjasama dengan ANRI (Lomba berjenjang sampai Tingkat Nasional);

- e. Kebutuhan Tenaga Pengelola Kearsipan Wajib diperhatikan baik dari segi kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan (Peningkatan SDM di bidang Kearsipan);
- f. Kebutuhan Sarana dan prasarana harus terpenuhi terutama Gedung Depo Arsip;
- g. Dibutuhkan pengembangan SIKN/JIKN yang berintegrasi dengan Kabupaten/Kota.

Beberapa usulan dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi Banten untuk memberikan anggaran berupa bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan pelayanan di Bidang Perpustakaan maupun Kearsipan pada Pra Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2017 tanggal Bulan 2017 sebagai berikut:

I. Urusan Perpustakaan:

- 1. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang
 - a. Bimtek pengelola perpustakaan
- 2. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Serang
 - a. Pengadaan gedung kantor
 - b. Pengadaan kendaraan dinas /operasional (mobil pintar)
 - c. Pembayaran honorarium pengelola mobil pintar
- 3. Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Serang
 - a. Mobil pelayanan perpustakaan keliling
 - b. Pembayaran honor pengelola perpustakaan desa
 - c. Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan berupa bantuan bahan pustaka untuk perpustakaan desa.
- 4. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Cilegon
 - a. E-Book

II. Urusan Kearsipan:

- 1. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang
 - a. Bimtek pengelola kearsipan
- 2. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Serang
 - a. Pengadaan gedung kantor Pembayaran hornorarium pengelola arsip desa / kelurahan
- 3. Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Serang
 - a. Pembayaran honor pengelola arsip daerah

Tabel II - 98

Usulan Kegiatan Dari Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah kab/Kota Se-Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ANGGARAN APBN (Rp)	ANGGARAN PENDAMPING / APBD (Rp)	ISU STRATEGIS	KETERANGAN		
1	PANDEGLANG	1	Bintek pengelola kearsipan	Kabupaten Pandeglang	100 orang	100,000,000		Masih kurangnya SDM pengelola kearsipan		
		2	Bintek pengelola perpustakaan	Kabupaten Pandeglang	150 orang	100,000,000		Masih kurangnya SDM pengelola perpustakaan		
2	KOTA SERANG	1	Pengadaan gedung kantor	KPAD Kota Serang	1 unit	4,000,000,000	2,000,000,000	Daya tampung perpustakaan umum daerah Kota Serang yang kurang representatif		
		2	Pengadaan kendaraan dinas / operasional (Mobil Arsip Keliling)	KPAD Kota Serang	1 unit	500,000,000	100,000,000	Publikasi program dan kinerja pemerintah daerah yang diterima masyarakat masih kurang		
		3	Pengadaan kendaraan dinas / operasional (Motor Pintar)	KPAD Kota Serang	5 unit	125,000,000	50,000,000	Terdapat pemukiman yang tidak mempunyai akses jalan yang dapat dilalui mobil		
		4	Pembayaran honorarium pengelola arsip desa / kelurahan	Desa /Kelurahan di Kota Serang	66 orang	792,000,000		Belum adanya arsiparis di desa /kelurahan		
		5	Pembayaran honorarium pengelola motor pintar	KPAD Kota Serang	5 orang	60,000,000		Minimnya anggaran pemerintah daerah		
3	KABUPATEN SERANG	1	Pengadaan modal pelayanan perpustakaan keliling	KPAD Kab. Serang	2 unit mobil pousling		800,000,000	Meningkatnya pelayanan perpustakaan keliling	APBD Provinsi	
		2	Pembayaran honor pengelola perpustakaan desa	Sekolah dan Desa	109 orang		192,200,000	Bertambahnya kinerja pengelola perpustakaan	APBD Provinsi	
		3	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan berupa bantuan bahan pustaka untuk perpustakaan desa	30 Perpustakaan Desa	30 Perpustakaan Desa			600,000,000	Bertambahnya koleksi bahan pustaka di desa	APBD Provinsi
		4	Pembayaran honor pengelola arsip daerah	SKPD dan Desa	143 orang pengelola arsip			257,400,000	Meningkatnya pengelolaan arsip di SKPD dan Desa	APBD Provinsi
4	CILEGON	1	E- Book	KPAD Kota Cilegon	1 paket	200,000,000	100,000,000	DAK		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telalahan Terhadap Kebijakan Nasional

Merujuk pada Rencana Strategi Perpustakaan RI Tahun 2015-2019 tentang arah kebijakan dan strategi nasional berupa peningkatan gemar membaca, pengembangan koleksi Indonesia yang lengkap dan mutakhir serta dapat diakses dengan mudah dan cepat, peningkatan diversifikasi dan kualitas layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pelestarian warisan dokumenter intelektual bangsa, peningkatan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Dalam visi, misi dan program aksi Presiden – Wakil Presiden RI telah dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawacita. Agenda kedua Nawacita ini dalam Buku RPJMN 2015-2019 dijabarkan salahsatunya adalah dengan membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Adapun kebijakan yang diterapkan guna mewujudkan agenda tersebut diantaranya penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan dengan strategi penguatan sistem kearsipan berbasis TIK. Kemajuan TIK yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam penyelenggaraan kearsipan.

Arah kebijakan dan strategi nasional inilah yang ke depannya harus segera diprediksi dari awal yang menjadi tantangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten untuk membangun perpustakaan dan arsip daerah yang lebih terarah dan terukur dengan cara tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh pemustaka dan pemangku kepentingan yang terkait

Selanjutnya dalam Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, penyelenggara kearsipan provinsi adalah lembaga kearsipan provinsi, yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip dilingkungan daerah provinsi dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota (satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintah daerah). Selain itu, lembaga kearsipan provinsi juga memiliki kewajiban pengelolaan arsip statis yang diterima dari.

- OPD dan penyelenggara pemerintah daerah provinsi;
- Lembaga Negara di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Perusahaan;
- Organisasi Politik;
- Organisasi Kemasyarakatan;
- Perseorangan;

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten, yaitu apa yang akan dicapai untuk kurun waktu 5 tahun kedepan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yg ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten tahun 2017-2022 berdasarkan rumusan misi adalah sebagai berikut:

Visi Misi yang ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 menggambarkan bagaimana tujuan akhir yang diinginkan oleh Gubernur terpilih lima tahun mendatang, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan budaya hidup yang ada di Provinsi Banten, yaitu :

**“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING SEJAHTERA DAN
BERAKHLAKUL KARIMAH”**

Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten dalam keberhasilan Visi tersebut adalah misi ke -1 yakni Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Dimana tujuan misi ke-1 tersebut adalah Terwujudnya kelembagaan Pemerintah daerah yang berakhlakul karimah dengan efisien, efektif, tranparan, akuntabel dan sumber daya aparatur yang berintegritas, berkompetensi dan melayani masyarakat. Sedangkan sasarannya adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja efektifitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah misi ke – 3 yakni Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas. Dimana tujuannya adalah Mewujudkan akses dan kualitas pendidikan menuju kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berdaya saing. Sedangkan sasarannya adalah : 1). Meningkatkan Minat Baca Masyarakat , dan 2). Meningkatnya Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah yang Berkualitas.

Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Umum	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
Telaah Renstra Perpustakaan Nasional RI					
1	Peningkatan kualitas dan diversifikasi layanan perpustakaan	Meningkatkan mutu dan akses layanan perpustakaan dan digitalisasi arsip	Masalah Misi 2 Belum Maksimal Pembinaan Kelembagaan Perpustakaan dan Kearsipan	Belum tersedianya aplikasi yang mendukung kebutuhan perpustakaan dan kearsipan yan berbasis TIK Belum tersedianya SOP yang memanfaatkan TIK dalam aktifitas Kerja Pengelolaan kegiatan perpustakaan dan kearsipan dari bentuk manual ke otomasi belum dilaksanakan Belum terintegrasinya koneksi SIKD-JIKD semua dinas	Perkembangan IPTEK sangat maju Standarisasi Perpustakaan Standarisasi Kearsipan
2	Peningkatan	Meningkatkan	Misi 3	Pembinaan Kelembagaan	Permintaan kebutuhan

No	Sasaran Umum	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	kualitas SDM Perpustakaan dan kearsipan	pembinaan dan pendampingan pengelolaan perpustakaan dan arsip pada OPD	Sumber Daya Manusia secara kuantitas dan kualitas masih kurang	Perpustakaan dan Kearsipan belum seluruhnya sesuai standar	jabatan fungsional tinggi
3	Peningkatan koleksi nasional dan pelestarian koleksi warisan documenter budaya bangsa Indonesia	Meningkatkan jumlah koleksi perpustakaan dan jumlah khasanah arsip Banten serta digitalisasi arsip	Misi 4 Kurangnya pengembangan jumlah koleksi bahan perpusatakaan	Koleksi bahan perpustakaan masih terbatas Belum tersedianya kegiatan pemeliharaan arsip statis yang berkesinambungan Arsip konvensional belum seluruhnya di alih media Data dan informasi pembangunan daerah masih sangat terbatas Khasanah arsip statis masih sangat terbatas	Tujuan Pembangunan Nasional Indeks Pembangunan Manusia
4	Peningkatan kegemaran membaca	Meningkatkan mutu layanan perpustakaan dan sosialisasi tertib arsip di daerah-daerah	Misi 5 Belum terwujudnya budaya membaca pada masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan masih sangat minim	
5	Peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan Nasional yang modern	Meningkatnya pusat wisata rekreasi dan edukasi berbasis kepustakaan dan arsip	Misi 6 Kurang dipahaminya fungsi perpustakaan sebagai pusat rekreasi edukatif	Perpustakaan sesuai standard masih terbatas	Perpustakaan adalah salah satu sumber belajar
Telaah Renstra Arsip Nasional RI					
1	Terwujudnya peningkatan tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang profesional dan transparan (Arsip)	Meningkatkan akuntabilitas keuangan, pembinaan dan pengawasan aparatur, serta pelayanan pemerintah	Misi 1 Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan arsip	Sarana dan prasarana baik jumlah maupun kualitasnya belum lengkap Sumber daya manusia Kearsipan yang baik dari kualifikasi dan kompetensi masih kurang Implementasi regulasi kearsipan belum maksimal	Political Will yang cukup tinggi dari pemerintah Undang-undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009
2	Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga Negara	Meningkatkan mutu layanan perpustakaan dan sosialisasi tertib arsip di daerah-daerah	Indeks kesadaran arsip masih rendah	Terbatasnya bentuk kegiatan sosialisasi kearsipan	

No	Sasaran Umum	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	pemerintah daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan, BUMN, BUMD organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan/ tokoh nasional (Arsip)				
3	Peningkatan kualitas SDM Perpustakaan dan kearsipan	Meningkatkan pembinaan dan pendampingan pengelolaan perpustakaan dan arsip pada OPD	Misi 3 Sumber Daya Manusia secara kuantitas dan kualitas masih kurang	Pembinaan Kelembagaan Perpustakaan dan Kearsipan belum seluruhnya sesuai standar	Permintaan kebutuhan jabatan fungsional tinggi

3.3 Program dan kegiatan

Pertimbangan utama dalam penentuan program dan kegiatan adalah RPJMD Provinsi Banten 2017-2022, yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi Banten Nomor 4 tahun 2012 dan telah dijabarkan dalam Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten dan Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten terdapat empat program dan 18 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2018 yaitu :

I. Urusan Pemerintahan Umum, Otonomi dan Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Program tata kelola Pemerintah :

- Kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset;
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
- Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur;
- Kegiatan Rapat Koordinasi ke Dalam dan Keluar Daerah;
- Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan Dan Pelayanan Perpustakaan;
- Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral .

II. Urusan perpustakaan

a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Kegiatan peningkatan kualitas layanan dan kerjasama perpustakaan;

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat;
- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan

b. Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Kegiatan pembinaan dan pengembangan sistem pengelolaan perpustakaan;

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan;
- Kegiatan Pengelolaan Bahan Deposit dan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan;
- Kegiatan Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika

III. Urusan kearsipan

a. Program Pengelolaan sistem kearsipan Kegiatan penataan, pemeliharaan dan pelestarian arsip daerah;

- Kegiatan Penelusuran, Akuisisi dan Pemeliharaan Arsip Statis;
- Kegiatan Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Arsip;
- Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis

Secara lebih terperinci rencana program, kegiatan, indikator, target dan pagu indikatif dapat dilihat pada Tabel III-1

Tabel III – 2

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2018

NO. KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLAK UKUR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU RENJA FINAL TAHUN 2018
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
5	1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	100%	13.745.000.000
5	2					BELANJA LANGSUNG			17.388.270.000
						Pemerintahan Umum, Otonomi dan Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
1	2	1	7	01		Program Tata Kelola Pemerintahan			9.410.618.000
1	2	1	7	01	001	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		100%	100.000.000
							1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	2 Dokumen	33.440.000

NO. KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLAK UKUR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU RENJA FINAL TAHUN 2018
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
							2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2 Kegiatan	33.380.000
							3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	2 Dokumen	33.180.000
1	2	1	7	01	002	Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		100%	272.500.000
							1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	3 Dokumen	32.400.000
							2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9 Dokumen	232.300.000
							3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	5 Dokumen	7.800.000
1	2	1	7	01	003	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur			2.630.000.000
							1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	9 Kegiatan	2.630.000.000
1	2	1	7	01	004	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor			930.600.000
							1 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor	12 bulan	180.500.000
							2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 bulan	323.300.000

NO. KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLAK UKUR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU RENJA FINAL TAHUN 2018
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
							3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK	12 bulan	426.800.000
1	2	1	7	01	005	Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		100%	3.878.400.000
							1 Operasional kantor Tidak tetap	12 bulan	82.100.000
							2 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)	12 bulan	219.400.000
							3 Penyediaan Barang Habis Pakai	12 bulan	382.680.000
							4 Penyediaan Bahan Cetak	12 bulan	168.550.000
							5 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 bulan	1.021.000.000
							6 Penyediaan Promosi dan Publikasi	12 bulan	46.200.000
							7 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 bulan	1.671.600.000
							8 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo	12 bulan	62.950.000
							9 Penyediaan BBM	12 bulan	223.920.000
1	2	1	7	01	006	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur		100%	124.000.000
							1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	1 Kegiatan	8.700.000
							2 Peningkatan Kompetensi Aparatur	3 Kegiatan	115.300.000

NO. KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLAK UKUR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU RENJA FINAL TAHUN 2018
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
1	2	1	7	01	007	Kegiatan Rapat Koordinasi ke Dalam dan Keluar Daerah		100%	1.250.118.000
							1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	495.860.000
							2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	754.258.000
1	2	1	7	01	008	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan Dan Pelayanan Perpustakaan			50.000.000
							Pengelolaan Kearsipan Dinamis	12 Bulan	50.000.000
1	2	1	7	01	009	Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral			175.000.000
							1 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah	1 Paket data profil	95.660.000
							2 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah	1 Paket Visualisasi	40.390.000
							3 pengelolaan PPID	1 kegiatan	4.950.000
							4 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	4 nilai IKM	34.000.000
							PERPUSTAKAAN		
1	2	1	7	15		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			3.234.000.000
1	2	1	7	15	004	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat			1.544.000.000

NO. KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLAK UKUR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU RENJA FINAL TAHUN 2018
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
							1 Peningkatan Pembudayaan Kegemaran Membaca	1360 orang	1.544.000.000
1	2	1	7	15	005	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan			1.440.000.000
							1 Standarisasi Perpustakaan	2 kegiatan	355.034.000
							2 Pengembangan Perpustakaan	2 kegiatan	1.084.966.000
1	2	1	7	15	006	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan			250.000.000
							1 Presentase OPD yang Menyelenggarakan Kearsipan Sesuai Ketentuan Kearsipan	80%	79.843.000
							2 Standarisasi Kearsipan	20 dokumen	104.145.000
							3 Jumlah Arsiparis Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	5 orang%	66.012.000
1	2	1	7	16		Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan			2.667.852.000
1	2	1	7	16	001	Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan			737.452.000

NO. KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLAK UKUR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU RENJA FINAL TAHUN 2018
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
							1 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	2 Kegiatan	250.189.000
							2 Kerjasama Perpustakaan	36 komunitas /lembaga	180.141.000
							3 Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan	150.000 orang	307.122.000
1	2	1	7	16	003	Kegiatan Pengelolaan Bahan Deposit dan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan			1.430.000.000
							1 Peningkatan Koleksi E-Book	1 paket	196.200.000
							2 Peningkatan Koleksi Perpustakaan	6000 eks	1.207.285.000
							3 Penelusuran karya cetak karya rekam dan Penyusunan Literatur Sekunder	50 eks	26.515.000
1	2	1	7	16	002	Kegiatan Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika			500.400.000

NO. KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLAK UKUR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU RENJA FINAL TAHUN 2018
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
							1 Otomasi Perpustakaan	2 Paket, 1 kali FGD	262.595.000
							2 Layanan media elektronik perpustakaan	12 bulan, 1 kali lomba	237.805.000
						KEARSIPAN			
1	2	1	8	15		Program Pengelolaan sistem kearsipan			2.075.800.000
1	2	1	8	15	001	Kegiatan Penelusuran, Akuisisi dan Pemeliharaan Arsip Statis			1.175.000.000
							1 Digitalisasi Arsip Statis Banten	100 Box	210.195.000
							2 Preservasi Arsip	2 Kali Fumigasi dan Perawatan	138.253.000
							3 Akuisisi Arsip Statis Banten	3.400 box	826.552.000
1	2	1	8	15	002	Kegiatan Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Arsip			300.800.000

NO. KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLAK UKUR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU RENJA FINAL TAHUN 2018
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
							1 Pemanfaatan Arsip	1 dokumen	98.460.000
							2 Pelayanan Kearsipan	13.000 orang	202.340.000
1	2	1	8	15	003	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis			600.000.000
							1 Penataan Arsip Di Record Center OPD	10 OPD	212.458.000
							2 Penataan Arsip Elektronik/Media Baru OPD	10 OPD	182.098.000
							3 Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah	10 OPD	205.444.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG									31.133.270.000



BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja DPK Provinsi Banten Tahun 2018 disusun sebagai tindak lanjut dan penjabaran teknis implementatif dari dokumen-dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya (RPJMD, RENSTRA DPK), dan berisi tentang rencana program kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, serta pagu indikatif tiap program dan kegiatan.

Dokumen Renja DPK Tahun 2018 disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPK sebagai salah satu OPD Pemerintah Provinsi Banten guna pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Dalam penyusunan rencana kerja dimaksud tentu saja sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Banten, aspirasi Kabupaten/Kota dan stakeholders serta ketersediaan anggaran. Pencapaian target-target pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan sangat ditentukan oleh faktor-faktor tersebut diatas.

Kebijakan pencapaian target-target pembangunan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah merupakan satu keharusan, dengan membuat skala prioritas pembangunan secara tepat. Selanjutnya kebijakan pengendalian pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan secara konsisten dan berkesinambungan wajib dilakukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta pencapaian sasaran atau target pembangunan yang telah ditetapkan.

Kepala
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Provinsi Banten

DR. H. AJAK MOESLIM, M.Pd
NIP. 19600610 198610 1 002

